



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan, maupun partisipasinya dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan dilakukan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar sampai tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang ini dapat bermanfaat.

Pangkalpinang, 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM DPPAKB.....	2
1.4 Analisis Perkembangan Strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPPAKB.....	15
2.3 IKU Dinas PPPAKB.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas PPPAKB.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2 Realisasi Keuangan.....	54
BAB IV PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
4.3 Langkah Perbaikan.....	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang merupakan Laporan Pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Pertama yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera capaian kinerja 100% (Baik).
2. Indikator Sasaran Kedua yaitu Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan capaian kinerja >100% (Baik Sekali).
3. Indikator Sasaran Ketiga yaitu Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan < 50% (Kurang).
4. Indikator Sasaran ke-empat yaitu Predikat Kota Layak Anak dengan capaian kinerjanya 71,47% (Cukup).
5. Indikator Sasaran Kelima yaitu Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun capaian kinerja 91% (Baik).

Dari kelima sasaran di atas, 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja Baik Sekali, 2 (dua) indikator dengan kategori realisasi kinerja Baik, 1(satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja cukup dan 1(satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja kurang.

- 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya kinerjanya Cukup (71,47), yaitu Indikator Predikat Kota Layak Anak.

Predikat Kota Layak Anak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2025 adalah dengan Predikat Nindya, akan tetapi setelah dilakukan penilaian Pangkal Pinang mendapatkan Predikat Pratama. Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, akan tetapi masih terdapat data-data yang dibutuhkan untuk penilaian belum dapat dipenuhi oleh perangkat daerah terkait. Data yang harus diinput adalah data-data dari lintas sektor yang dibutuhkan sesuai dengan data yang diminta pada aplikasi penilaian KLA dari Kementerian PPPA.

- 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya kinerjanya Kurang (<50) yaitu Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini masih kurang dari 50%. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain kegiatan pencegahan kekerasan, penyediaan layanan dan penguatan lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan tahun lalu Angka Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan sudah menurun. Dari sebelumnya 0,066% menjadi 0,048 %. Pada Tahun 2024 perempuan korban kekerasan sebanyak 78 kasus, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 59 Orang. Terdapat penurunan 0,018%.

- 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya kinerjanya Cukup (71,47), yaitu Indikator Predikat Kota Layak Anak.

Predikat Kota Layak Anak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2025 adalah dengan Predikat Nindya, akan tetapi setelah dilakukan penilaian Pangkal Pinang mendapatkan Predikat Pratama. Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, akan tetapi masih terdapat data-data yang dibutuhkan untuk penilaian belum dapat dipenuhi oleh perangkat daerah terkait. Data yang harus diinput adalah data-data dari lintas sektor yang dibutuhkan sesuai dengan data yang diminta pada aplikasi penilaian KLA dari Kementerian PPPA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota menyampaikan dokumen kinerja tahunan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala perangkat daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang yaitu:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Penetapan Rencana Strategis dinas untuk mendukung Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang dan Kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang membawahi :

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan

- 5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Struktur Organisasi

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang
(terlampir)

2) Jumlah Pegawai

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 55 (lima puluh lima) pegawai dengan komposisi 28 orang PNS atau sebesar 50,91%, 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebesar 1,82%, 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu atau sebesar 40% dan 4 (empat) orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	L	P	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	3	25	28	50,91%
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		1	1	1,82%
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	10	12	22	22%
4.	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	3	1	4	4%
Total Pegawai		16	39	55	100%

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS		PPPK		PPPK Paruh Waktu		Kontrak / PJLP		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	SD					1				1	
2.	SLTP Sederajat						1				1
3.	SMA Sederajat	1	1			4	1		2	5	4
4.	D1										
5.	D3		3				3		1		7
6.	S1		18		1	6	6	1		7	25
7.	S2	2	3							2	3
	Jumlah	3	25		1	11	11	1	3	15	40

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I			
2.	Golongan II/c		1	1
3.	Golongan III/a	1	3	4
4.	Golongan III/b		3	3
5.	Golongan III/c		1	1
6.	Golongan III/d		13	13
7.	Golongan IV/a	1	3	4
8.	Golongan IV/b		1	1
9.	Golongan IV/c	1		1
	Jumlah	3	25	28

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Desember 2025

3) Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi

a. Faktor Internal Organisasi antara lain :

1. Masih kurangnya pegawai terutama untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dalam melaksanakan tugas layanan perlindungan perempuan dan layanan perlindungan anak hanya dilaksanakan oleh 3 Orang Pegawai yaitu terdiri dari 1 (Satu) PNS yakni Kepala UPTD PPPA, 1 Orang CPNS serta 1 (Satu) orang PPPK Paruh Waktu. Hal ini menyebabkan beban kerja yang banyak sehingga pekerjaan belum maksimal.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terutama pada UPTD PPPA dikarenakan pada Dinas PPPAKB tidak ada pengadaan Sarana Prasarana Pada Tahun 2025.

b. Faktor Eksternal Organisasi antara Lain :

1. Terkait pencapaian Nilai Kota Layak Anak belum mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan untuk penilaian KLA membutuhkan dokumen/data dari semua OPD terkait, akan tetapi terkendala dengan lambatnya data yang masuk dan terkadang dokumen/data yang diminta tidak ada atau dokumen/data ada akan tetapi setelah dilakukan validasi data tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang akan tetapi masih perlunya penguatan/ koordinasi lintas sektor terkait pencegahan tindak kekerasan.
3. Lambatnya Dana Salur dari Pusat untuk Kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana maupun DAK Non Fisik PPPA sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

4) SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
2. Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Analisis Perkembangan Strategi

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyampaikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya gap kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu Kota yang menyusun RPD untuk Tahun 2024-2026 sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPD Kota Pangkal Pinang dengan Jangka waktu 3 Tahun yaitu 2024-2026.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu kota yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026.

1. Tujuan RPD

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.
- 2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing.
- 3) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

2. Sasaran RPD

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Meningkatnya kualitas kesempatan kerja.
- 5) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 7) Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat.
- 8) Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- 9) Meningkatnya produktivitas sector perekonomian unggulan daerah.
- 10) Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.
- 11) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar.
- 12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu :

1. **Tujuan 1** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance dengan **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.
2. **Tujuan 2** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing dengan **Sasaran 8** Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

Tabel 2.1
TUJUAN

No	Tujuan RPD Kota Pangkal Pinang	Sasaran RPD Kota Pangkal Pinang	Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan
			Meningkatnya pembangunan keluarga

Tabel 2.2
SASARAN

NO	TUJUAN DPPPAKB	SASARAN DPPPAKB
1.	Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera
2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan
		Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya nilai KLA
3.	Meningkatnya pembangunan keluarga	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

2.3 IKU Dinas PPPAKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 Berikut.

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	1.	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	2.	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
4.	Meningkatnya nilai KLA	4.	Predikat Kota Layak Anak
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja (PERKIN) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja disepakati antara pengembalian tugas dengan atasannya.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NO	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	%	100
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	2.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	%	22
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,013
4.	Meningkatnya nilai KLA	4.	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	701-800 (Nindya)
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	Rata-Rata Anak per Wanita	2

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas akan dilaksanakan melalui 5 (lima) Indikator Kinerja dengan 9 (Sembilan) Program Utama dan 1 (Satu) Program Penunjang.

Tabel 2.5
PROGRAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000,-
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	345.536.784,-
2.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14.914.000,-
3.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	327.808.000,-
4.	Predikat Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	29.550.000,-
		Program Perlindungan Khusus Anak	215.115.000,-
5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	Program Pengendalian Penduduk	220.314.000,-
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.479.541.000,-
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.418.830.000,-

NO	PROGRAM PENUNJANG	PROGRAM
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.822.533.114,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai kinerja instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kota Pangkal Pinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pencapaian Tujuan serta sasaran Renstra Dinas Tahun 2024-2026.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	2.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	22%	37,71%	>100%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	3.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,013%	0,048%	<50%
4.	Meningkatnya nilai KLA	4.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	501 (Pratama) Predikat	71,47%
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	5.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,18 Rata-Rata Anak per Wanita	91%

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Dimana Perjanjian Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja dengan cara pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Membandingkan Target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Berdasarkan perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 - 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2024		Realisasi 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	20%	33,23%	22%	37,71%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,014%	0,066%	0,013%	0,048%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	Pada Tahun 2024 baru dilakukan penginputan data	701-800 (Nindya) Predikat	501 (Pratama) Predikat
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita	2,18 Rata-Rata Anak per Wanita

Dilihat dari tabel diatas, adanya perbaikan dari 2 indikator kinerja sasaran jika dibandingkan tahun sebelumnya. Antara lain sebagai berikut :

1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebelumnya pada Tahun 2024, Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan yaitu 0,066% dengan jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 78 Orang. Sedangkan pada Tahun 2025 Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan yaitu 0,048% dengan jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 59 Orang. Terjadi penurunan kasus kekerasan sebesar 0,018% atau berkurang 19 Kasus dari tahun sebelumnya.

2. Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

Pada Tahun 2024, Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun yaitu 2,25 Rata-Rata Anak per Wanita. Sedangkan pada Tahun 2025 capaiannya yaitu 2,18 Rata-Rata Anak Per Wanita. Untuk Angka Kelahiran Total (TFR), semakin mendekati angka 2 maka capaian kinerja semakin baik.

2. Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Kinerja dalam beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	-	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	-	-	-	33,23%	37,71%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,015 %	0,028%	0,042%	0,066%	0,048%
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	635 (Madya)	686 (Madya)	690 (Madya)	Pada Tahun 2024 baru dilakukan penginputan data	501 (Pratama)
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata-Rata Anak per Wanita	1,98 Rata-Rata Anak per Wanita	2,26 Rata-Rata Anak per Wanita	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	2,18 Rata-Rata Anak per Wanita

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026
1.	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	33,23%	37,71%	38%
3.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,066%	0,048	0,012
4.	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Pada Tahun 2024 baru dilakukan penginputan data	Pratama (501)	Nindya (701-800)
5.	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	2,18 Rata-Rata Anak per Wanita	2 Rata-Rata Anak per Wanita

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;

1) Sasaran : Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2025, untuk sasaran Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan indikatornya Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera target kinerja 100% dan realisasi kinerja 100% sehingga Tingkat capaian kinerjanya adalah 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Perhatian penuh dari pimpinan sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan rutin dilaksanakan sampai berjenjang di tingkat terbawah mulai dari RT/RW.
2. Adanya stimulan untuk Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan yang aktif melalui anggaran yang mendukung dalam kegiatan tersebut.
3. Apresiasi bagi kader yang berprestasi.

4. Pelaksanaan lomba-lomba yang berjenjang dari Tingkat Kota sampai Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap tahunnya untuk melihat keberlangsungan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan tersebut.

Strategi atau Solusi yang Dilakukan agar sasaran Dinas PPPAKB “Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera antara lain “ pada tahun selanjutnya tetap dengan tingkat capaian 100% antara lain :

1. Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan mendukung dalam keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kader dan manfaat dapat langsung dirasakan kader.
3. Reward untuk apresiasi kepada kader yang berprestasi.
4. Pelaksanaan lomba untuk inovasi dalam mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
5. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung keaktifan kader kelembagaan tersebut.

6. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.

2) Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

Pada tahun 2025 untuk sasaran “Meningkatnya Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan” dengan indikatornya Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan target kinerjanya 22% dengan realisasi kinerja 37,71% sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah di atas 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan diantaranya adalah :

1. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak.
2. Penguatan kebijakan yang melindungi hak perempuan untuk bisa terlibat di dalam Lembaga Pemerintahan.
3. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, pemerintahan dan dunia usaha.

Strategi atau Solusi yang Dilakukan agar sasaran Dinas PPPAKB “Meningkatnya Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan “ pada tahun selanjutnya tetap dengan tingkat capaian diatas 100% antara lain :

1. Memberikan Advokasi kepada pengambil pemangku/pengambil kebijakan agar memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi pada Lembaga Pemerintahan.
2. KIE kepada masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kesetaraan gender.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan

3) Sasaran : Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada tahun 2025 untuk sasaran “Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan” dengan indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan, target kinerjanya 0,013 % dengan realisasi 0,048% sehingga tingkat realisasi capaian kinerjanya di bawah 50%. Walaupun Tingkat realisasi capaian kinerjanya kurang dari 50%, akan tetapi jika dilihat dari angka Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan pada Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024.

Faktor Penghambat Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah :

1. Literasi Digital

Kurangnya Literasi Digital oleh sebagian masyarakat kita secara tidak langsung bisa meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

2. Kurang massifnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

3. Pergeseran stigma oleh sebagian masyarakat kita yang menjadi korban kekerasan, dimana mereka menganggap menjadi korban kekerasan adalah aib keluarga yang harus ditutupi.

4. Pengaruh dari teknologi

Adanya kemajuan teknologi berdampak sangat besar terhadap peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan. Penggunaan Telpon Seluler secara tidak terbatas yang memungkinkan kita bebas mengakses apa saja yang memungkinkan kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Adanya Faktor Ekonomi

Perempuan tidak mandiri secara ekonomi sehingga lebih rentan dan sulit meninggalkan pelaku kekerasan dikarenakan adanya rasa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

6. Ketergantungan Psikologis korban kekerasan terhadap pelaku.

Pelaku sering menunjukkan penyesalan yang membuat korban berharap pelaku akan berubah, sehingga korban kembali bertahan dalam hubungan.

Strategi atau Solusi yang harus dilakukan kedepannya untuk mengatasi hal di atas antara lain :

1. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Korban Kekerasan.
2. Advokasi kebijakan dan Layanan kekerasan terhadap Perempuan.
3. Rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan.
4. Diseminasi informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.
5. Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan korban kekerasan.

6. Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Penyebarluasan Informasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Layanan Perlindungan Perempuan.
7. Menyusun MOU atau PKS dengan Dinas Instansi, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi dan lain-lain terkait Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan.
8. Membuat Nota Kesepatan Lintas instansi dalam rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.
9. Melakukan sosialisasi ke Lembaga Masyarakat (TP PKK kecamatan dan Kelurahan) terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan).
10. Penyuluhan Literasi Digital kepada Lembaga Masyarakat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

4) Sasaran : Meningkatnya Nilai KLA

Pada tahun 2025 untuk sasaran “Meningkatnya Nilai KLA “dengan indikator Predikat Kota Layak Anak, target kinerjanya Adalah Nindya (701-800) dengan realisasi Pratama (501) sehingga tingkat tealisasi nya sebesar 71,47%. Capaian kinerja untuk sasaran ini belum mencapai target.

Adapun faktor penghambat keberhasilan dalam pencapaian meningkatnya Nilai KLA (Predikat Kota Layak Anak) diantaranya adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat bermain ramah anak.
2. Kurangnya komitmen lintas sektor dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak.
3. Belum dipahaminya hak-hak anak.
4. Kurangnya ketersediaan data dari instansi terkait untuk mendukung pencapaian Nilai KLA.
5. Data tersedia akan tetapi ketika dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA, data tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

1. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bisa berbentuk kebijakan.
2. Setiap proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegrasikan seluruh hak-hak anak ke dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

3. Untuk data-data yang diperlukan ketika penginputan pada aplikasi dari Kementerian PPPA, dapat lebih dipersiapkan.
4. Pengembangan inovasi pemerintah khususnya dalam mengakselerasi program Kota Layak Anak.
5. Melakukan jemput bola untuk data yang diminta jika adanya keterlambatan pengiriman data dari instansi terkait.
6. Melakukan sosialisasi mengenai data apa saja yang diperlukan/ harus dipenuhi oleh instansi terkait untuk penilaian KLA.
7. Komitmen kuat bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pencapaian nilai KLA.
8. Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya pemenuhan hak anak.

5) Sasaran : Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

Pada tahun 2025 untuk sasaran “Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang” dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun target kinerjanya 2 (Rata-Rata Anak per Wanita) dengan realisasi 2,18 (Rata-Rata Anak per Wanita) sehingga tingkat tealisasi nya sebesar 91% atau belum mencapai 100%.

Faktor Penghambat Keberhasilan dalam dalam pencapaian sasaran Penduduk Tumbuh Seimbang diantaranya adalah :

1. Rendahnya literasi masyarakat dikarenakan masyarakat belum mamahami konsep berkeluarga dan Program KB.
2. Mitos dan kesalahan pemahaman dalam ber-KB.
3. Kurangnya sosialisasi, kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang pelayanan kontrasepsi.
4. Pandangan masyarakat.
5. Kurangnya peran Tokoh Agama dalam mendukung Program KB.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

1. Melakukan penyuluhan.
2. Melakukan pelayanan KB.
3. Pelatihan.
4. Sosialisasi.
5. Promosi KB.
6. Program Bina Keluarga Remaja (BKR).
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
8. MOU (kerjasama) dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
9. Inovasi

10. Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan mitra kerja.
 11. Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
 12. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB.
 13. Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) Realisasi	Efesiensi
1.	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	100	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	100	-
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	345.536.784	344.936.771	99,83	600.013
2.	Meningkatnya Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	22	37,71	>100	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14.914.000	14.824.000	99,40	90.000
3.	Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,013	0,048	<50	Program Perlindungan Perempuan	327.808.000	268.939.597	82,04	-
4.	Meningkatnya Nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya)	501 (Pratama)	71,47	Program Pemenuhan Hak Anak	29.550.000	29.550.000	100	-
						Program Perlindungan Khusus Anak	215.115.000	159.618.145	74,20	-
5.	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2	2,25	91	Program Pengendalian Penduduk	220.314.000	216.112.910	98,09	-
						Program Keluarga Berencana	1.479.541.000	1.380.869.100	93,33	-
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.418.830.000	1.418.039.048	99,94	-
										690.013
										(Efesiensi) 0,77%

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Penggunaan Anggaran untuk menunjang sasaran Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera sudah efisien. Dimana capaian kinerjanya 100% dengan didukung oleh 2 (Dua) Program. Dengan tingkat efisiensi anggaran 0,17 % dari Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Penggunaan Anggaran untuk menunjang sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan sudah efisien. Dimana capaian kinerjanya >100% didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,6%.

Efisiensi anggaran sebesar Rp.690.013 yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa;
2. Sisa belanja perjalanan dinas

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan realisasi 100%. Dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sudah aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu :

Tabel 3.6.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja
Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif
dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2) Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	22%	37,72%	>100%

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan yaitu :

Tabel 3.7.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3) Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 20245		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,013%	0,048%	<50%

Untuk Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini masih kurang dari 50%. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain kegiatan pencegahan kekerasan, penyediaan layanan dan penguatan lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu :

Tabel 3.8.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

4) Predikat Kota Layak Anak

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Predikat Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Predikat Kota Layak Anak	701-800 (Nindya) Predikat	501 (Pratama)	71,47

Untuk Indikator Predikat Kota Layak Anak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2025 adalah dengan Predikat Nindya, akan tetapi setelah dilakukan penilaian Pangkal Pinang mendapatkan Predikat Pratama. Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, akan tetapi masih terdapat data-data yang dibutuhkan untuk penilaian belum dapat dipenuhi. Data yang diminta/ yang harus diinput adalah data-data dari lintas sektor yang dibutuhkan sesuai dengan data yang diminta pada aplikasi penilaian KLA dari Kementerian PPPA.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung

Kinerja Predikat Kota Layak Anak yaitu :

Tabel 3.9.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja
Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

5) Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS
Usia 15-49 tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	2 Rata- Rata Anak per Wanita	2,18 Rata- Rata Anak per Wanita	91%

Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 2 Rata-Rata Anak per Wanita realisasi nya 2.25 Rata-Rata Anak per Wanita dengan persentase capaian kinerja 87,5%.

Dalam rangka mencapai kinerja ini, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sudah dilaksanakan kepada masyarakat melalui Media Mass Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Selain itu Penyuluh Keluarga Berencana(PKB)/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta para Kader PPKBD dan Sub PPKBD sudah bekerja dilapangan akan tetapi hasilnya masih belum maksimal sehingga belum mencapai target.

Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun yaitu:

Tabel 3.10.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja
Predikat Kota Layak Anak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang. Total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang adalah Rp. 8.839.212.222,10 (berdasarkan data DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.462.071.410 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,73% sampai akhir tahun 2025.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	345.536.784	344.936.771	99,83%
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14.914.000	14.824.000	99,40 %
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.762.603.438	4.604.181.839	96,67%
5.	Program Perlindungan Perempuan	327.808.000	268.939.597	82,04 %
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	29.550.000	29.550.000	100%
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	215.115.000	159.618.145	74,20%
8.	Program Pengendalian Penduduk	220.314.000	216.112.910	98,09 %
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.479.541.000	1.380.869.100	93,33%
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.418.830.000	1.418.039.048	99,94 %
		8.839.212.222,10	8.462.071.410	95,73%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan 5 (lima) indikator sasaran. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Pertama yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera capaian kinerja 100% (Baik).
2. Indikator Sasaran Kedua yaitu Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan capaian kinerja >100% (Baik Sekali).
3. Indikator Sasaran Ketiga yaitu Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan < 50% (Kurang).
4. Indikator Sasaran ke-empat yaitu Predikat Kota Layak Anak dengan capaian kinerjanya 71,47% (Cukup)
5. Indikator Sasaran Kelima yaitu Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun capaian kinerja 91% (Baik).

Dari kelima sasaran di atas, 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja Baik Sekali, 2 (dua) indikator dengan kategori realisasi kinerja Baik, 1(satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja Cukup dan 1(satu) indikator kinerja dengan realisasi kinerja Kurang.

4.2. Saran

- Dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun, semua bidang harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan kinerja sehingga capaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.3. Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setelah adanya asistensi penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis DPPPAKB Tahun 2025-2030.
2. Meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern guna meningkatkan pengawasan dan pemantauan terkait penggunaan anggaran.
3. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
NP. 19670091904031004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS
RATNA JANITA, S.Sn, M.M
NP. 197302141980032003

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEGAWAJAN
SUPRIATI, S.AP
NP. 197306222007012005

ANALIS PERENCANAAN NEGARA AHLI MUDA
FITRA, S.E
NP. 197902012007012007

PERENCANA AHLI MUDA
MERNA FELIANA, S.IP
NP. 198608192019012023

PENGELOLA BARANG MELUK NEGARA
SRI KANDYAN, AMK
NP. 198408192009042010

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
NATYA APRILIA KURNIASARI, S.T
NP.PPL. 198803222007012004

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SHEMLLY CRISTAPPA, S.Sos
NP. 197910072006043009

PII KEPALA BIDANG KELUARGA BERTOKOMUNIKASI, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
HENI SETIWA ANGELIA, S. St.Psi
NP. 198902112019012016

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PERILAKU, PERLINDUNGAN DAN PENGOBATAN
MIRNATI, SP
NP. 198007111980032005

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DARMA, S.STP
NP. 199010212010102001

ANALIS KEBUDJAJARAN AHLI MUDA
REHAY HUSNITA, S.E
NP. 198404122010012001

PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
EMILJA, SKM
NP. 198112022006042012

PENATA KEPENDUKUN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
CHIKAR ALFANO, SKM, MKM
NP. 197706112006031002

PENGOBATAN SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
NANDIARTY, SKM
NP. 197903252006042007

ANALIS KEBUDJAJARAN AHLI MUDA
MUAROFAH, S.Sos
NP. 198109262006043001

PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
SWAGY SUTAMANE, S.E
NP. 197903112006012008

PENELAAN TEKNIK KEBUDJAJARAN
MEGAWATI, SKM
NP. 197812042006042008

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
LAILI SURYANI, S.E
NP. 197407012007012002

PENGAWAS PENGEMPUAN DAN ANAK
RUBI APRILIANTY, S. ST
NP. 199209102010102003

PENELAAN TEKNIK KEBUDJAJARAN
ERNA, SKM, MKM
NP. 198110032006042002

PENELAAN TEKNIK KEBUDJAJARAN
CHITARENA, SKM, SPOM
NP. 198604102006042003

PENGELOLA PELAYANAN DAN PERENCANAAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA
HENORA SATRIA
NP. 197308062007011004

PENYULUH PEMBANGKITAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK
YUNITA AFSARI, S.Psi
NP. 199507022020122002

PENYULUH PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
ACHES TANTI RISDI PUTRI, S.Sos
NP. 199108102022032017

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
NOVIA RUSTINA
NP. 199011131990022002

PENGKOLABORASI PENGANTARAN GENDER
RENZI DWARTI, S.Kep
NP. 199201242010072012

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
LELYANG DWI ESTY, AM, Ksp
NP. 198410212010012021

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
1	Ahmad Tawar, A.Md	10	Adhennyah, A.Md.Kep
	NP. 198201072019011914		NP.PPK. 198312202022211001
2	Diky, A.Md	11	Fahad, AMK
	NP. 199312242018011808		NP.PPK. 199210122022211001
3	Imam Titiana Adimas, A.Md	12	Zakky Anissa, A.Md.Kep
	NP. 198003192010011002		NP.PPK. 198610072022211001
4	Auzya U Husni Sanjaya, S.Sos	13	Zula Rosari, A.Md.Kab
	NP. 198608042016021601		NP.PPK. 198802132022212001
5	Lailana Dewinda, S.Sos	14	Mu Sa'idi, S.Kep
	NP. 198712162011012603		NP.PPK. 198301152022212001
6	Jennyah, SST	15	Rakia Astora, S.E
	NP. 198809272016032609		NP.PPK. 199111202022212001
7	Rahmat Hasbiyullah, SKM	16	Reti Clara, S.Psi
	NP. 198002052016021601		NP.PPK. 198710032022212001
8	A. Nugh Arjuna, A.Md	17	Widia Saputri, S.I.Kom
	NP. 198904142014021606		NP.PPK. 198807072022212001
9	Sri Asluti, S. Sos	18	Ardya Ningsrum
	NP. 198412122015032801		NP.PPK. 198508062022212001

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
MERYANCE, S.E
NP. 198303282010012016

PENGKOLABORASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CHAMATI, A.Md
NP. 199205282020042001



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
NP. 19670091904031004